KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK: STUDI KASUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

INTRA-PARTY CONFLICT: A CASE STUDY OF NATIONAL AWAKENING PARTY

Kamarudin

Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP-UI)

Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

E-mail: kamarudin@ui.ac.id

Diterima: 23 Februari 2013; direvisi: 25 April 2013; disetujui: 5 Juni 2013

Abstract

This study offers significant findings that are, first, the internal conflict that occurred within PKB is more triggered by pragmatic issues that are related to power distributions in structural positions. This pragmatic issue not only always occurs when the party worked together with other groups as indicated by Deliar Noer (the withdrawal of NU from Masyumi) and Bahtiar Effendy (the withdrawal of NU from PPP), but also happened when it formed its own party (PKB). The study of Kang Young Soon which concludes that conflict is "one of NU tradition" finally should be given a further explanation that "the conflict that is triggered by pragmatic interest toward the power is one of NU traditions". It is true that an ideological factor also contributes to the conflict but again the pragmatism in achieving the power still dominates the movie of friction between NU and other groups or even within NU's elites as indicated in almost internal conflict of PKB. Second, the involvement of kiai in political arena causes the changing pattern and values of relation (kiai-santri patron). The case of the internal conflict among PKB's elites shows that the mutual trust as a symbol of pesantren tradition which has been established for long may change merely caused by the pragmatic power. This change can be observed from the stance and position of the kiai who form Forum Langitan that initially supported Abdurrahman Wahid but drastically against him.

Keywords: *internal conflict, faction, PKB*

Abstrak

Kajian ini menunjukkan, pertama, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifat pragmatis terkait dengan perebutan posisi dalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanya berlaku ketika kalangan nahdliyin bergabung dengan komponen bangsa yang lain, seperti ditunjukkan oleh studi Deliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi) dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP), namun studi ini menunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik di antara sesama fungsionaris partai yang dilahirkan oleh kalangan nahdliyin terjadi. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa konflik merupakan "salah satu tradisi NU" pada akhirnya perlu ditambah dengan penjelasan bahwa "konflik yang dipicu oleh masalah pragmatisme kekuasaan merupakan salah satu tradisi NU." Memang pernah ada konflik karena faktor ideologi, namun pragmatisme kekuasaan seringkali menjadi motif di balik perseteruan NU dengan pihak lain ataupun dengan sesama kalangan nahdliyin seperti terlihat pada kasus konflik internal PKB. Kedua, terjadi pergeseran nilai dalam hubungan kiai-santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron-klien ketika kalangan nahdliyin berkiprah di wilayah politik. Kasus konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadi unsur pembentuk budaya pesantren bisa berubah karena masalah pragmatisme kekuasaan.

Kata Kunci: konflik internal, kubu, PKB

Pendahuluan

Salah satu dampak dari kejatuhan rezim otoritarianisme Soeharto adalah publik memperoleh ruang bebas dalam mengekspresikan aspirasi dan kepentingan politik. Bentuk konkret dari ekspresi kebebasan itu adalah lahirnya partai-partai politik baru serta muncul kembali sejumlah partai-partai politik lama. Ibaratnya, setelah sekitar empat dekade terkubur, sukma Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta No. X tanggal 3 November 1945¹ tentang pendirian partai-partai politik kembali muncul ke permukaan.² Hingga batas akhir pendaftaran keikutsertaan pemilu pertama pasca-Orde Baru terdapat 148 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman. Dari jumlah itu, berdasarkan hasil verifikasi Tim 11,³ hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti Pemilu 1999.

Kehadiran partai-partai politik itu memang diperkenankan di dalam sistem demokrasi yang menghormati pluralisme. Namun, pada sisi lain justru memperlihatkan wajah fragmentasi, baik di kalangan nasionalis sekuler maupun pada kekuatan politik Islam. Fragmentasi pada kekuatan politik nasionalis sekuler, misalnya, terlihat pada hadirnya PDI Perjuangan, PDI, PNI Massa Marhaen, dan partai-partai lainnya. Di kalangan Islam, terlihat dari lahirnya begitu banyak partai politik Islam. Dari 148 partai politik, 42 di antaranya dikategorikan sebagai partai politik Islam dan setelah melalui proses verifikasi hanya

20 partai politik Islam yang lolos seleksi untuk mengikuti Pemilu 1999.⁴

Di kalangan Islam, konflik internal itu tidak hanya dilihat dari kategori partai berhaluan modernis dan tradisional, namun juga bisa ditengok dari sisi internal kategori tersebut. Di kalangan tradisional yang direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama (NU), fragmentasi terlihat dengan ditandai lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Solidaritas Uni Indonesia (Partai SUNI), Partai Nahdhatul Ummah (PNU), dan Partai Kebangkitan Ummat (PKU). Kalangan modernis yang dalam Pemilu 1955 berada di bawah bendera Partai Masyumi juga mengalami hal yang sama, dengan lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Masyumi Baru (PMB), dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPIIM). Belum lagi kehadiran sejumlah partai yang juga memiliki karakter mirip Masyumi, seperti Partai Keadilan (PK, yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dengan fragmentasi semacam ini, kekuatan politik Islam mengalami kesulitan melakukan konsolidasi sehingga berujung pada kekalahan. Pada Pemilu 1999, jumlah seluruh suara yang diperoleh partai-partai politik Islam secara akumulatif adalah 39.758.725 atau 37,56% dari total suara sah (105.846.000). Dibandingkan dengan partai-partai lain, baik dari kalangan nasionalisme sekuler, Katolik, Kristen, maupun yang lainnya, perolehan suara partai politik Islam jelas terlihat timpang, yaitu 39.758.725 berbanding 66.087.275. Itu artinya 62,44% pemilih di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini tidak memberikan suaranya kepada partai Islam.

Pasca-Pemilu 1999 masyarakat menyaksikan satu demi satu partai politik Islam mengalami konflik internal. Partai-partai yang dimaksud

¹ Soal partai politik pada masa itu lihat antara lain George Mc-Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980).

² Indonesianis Dr. Lance Castles menyebut fenomena pendirian partai-partai politik pasca lengsernya Soeharto dengan sebutan "*The Age of Parties*". Hairus Salim H.S. et al., *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, (Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS Gamiran, 1999).

³ Tim 11 adalah nama populer dari Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) yang dibentuk berdasarkan SK Mendagri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Nomor 06 Tahun 1999 tertanggal 3 Februari 1999. Komposisi keanggotaan Tim 11 adalah Nurcholish Madjid sebagai ketua, Adi Andono Sutjipto sebagai wakil ketua, dan beranggotakan Adnan Buyung Nasution, Miriam Budiardjo, Afan Gaffar, Kastorius Sinaga, Andi Mallarangeng, Mulyana W. Kusumah, Eep Saefulloh Fatah, dan Rama Pratama. Tugas utama tim ini adalah menyeleksi partai politik yang berhak untuk mengikuti pemilu pada 7 Juni 1999. Tanggal 4 Maret 1999, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid selaku Ketua LPU menerima hasil kerja Tim 11 dan mengesahkan empat lusin partai politik tersebut melalui SK No. 31 Tahun 1999.

⁴ Ada lima kriteria yang dapat diajukan untuk mengategorikan sebuah partai sebagai partai Islam, yaitu nama, asas, tanda gambar, tujuan/program, dan konstituen. Lantas mengacu lima kriteria tersebut maka definisi yang bisa diajukan untuk partai Islam adalah "partai yang memakai label Islam (nama, asas, dan tanda gambar); atau partai yang tidak memakai label Islam, tetapi hakikat perjuangannya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa harus mengabaikan kepentingan umat agama lainnya; atau partai yang tidak memakai label Islam dan tujuan/programnya untuk kepentingan semua warganegara RI, tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam". Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999), hlm. 8–11.

adalah PPP, PKB, PAN, dan PBB. Gradasi konflik internal itu terentang dari yang paling ringan, yakni sejumlah fungsionarisnya keluar dari kepengurusan partai hingga yang terparah adalah munculnya kepengurusan tandingan atau pengurus partai yang membentuk partai politik baru. PAN adalah partai yang mengalami konflik dengan kadar ringan di mana sejumlah fungsionaris partai, yang dimotori Faisal Basri dan Bara Hasibuan, memilih keluar dari kepengurusan partai.

Sebaliknya, kadar terberat dengan munculnya kepengurusan tandingan ataupun partai politik baru dialami PKB, PPP, dan PBB. Konflik internal PKB melahirkan kepengurusan tandingan antara PKB Batutulis yang dipimpin Matori Abdul Djali dan PKB Kuningan yang dipimpin Alwi Shihab. Dalam perkembangan selanjutnya, PKB Matori Abdul Djali mendirikan partai baru bernama Partai Kebangkitan Demokrasi (PEKADE). PPP yang merupakan empat fusi partai politik Islam di tahun 1973 itu pecah dengan lahirnya PPP Reformasi yang kemudian berganti nama menjadi Partai Bintang Reformasi yang dimotori K.H. Zainuddin M.Z. Sementara itu, dari konflik internal PBB melahirkan partai politik baru, yakni Partai Islam Indonesia (PII) yang dipelopori Hartono Marjono dan Abdul Qadir Jaelani yang memimpin Partai Al-Islam Indonesia (PAS) Indonesia.

Seperti konflik internal partai lainnya yang bermuara pada persoalan kepemimpinan, PKB juga demikian. PKB adalah “sayap” politik dari NU yang memiliki sejarah panjang dan bahkan pernah menjadi partai politik. Sekalipun NU memiliki kontribusi signifikan dalam perjalanan politik Indonesia, namun selama lebih dari tiga dasawarsa kekuasaan Orde Baru potensi politik warga NU dieliminasi. Sejalan dengan semangat reformasi, warga NU berusaha membangun kembali potensi politiknya sebagai bagian dari kesinambungan tradisi memberikan sumbangan bagi pembangunan politik bangsa Indonesia.⁵

⁵ Pendirian PKB serta tiga partai lainnya di lingkungan NU, tentunya mengundang pertanyaan publik terutama dikaitkan dengan masalah Khittah 1926 yang mengamanatkan NU untuk hanya berkiprah di wilayah sosial keagamaan, dengan memosisikan NU sebagai organisasi kemasyarakatan semata. Mengenai masalah ini, Sholahuddin Wahid berkomentar sebagai berikut, “Kalau NU kembali menjadi partai politik maka warga NU di ketiga orsospol itu akan mengabungkan diri ke dalam

Pengurus Besar NU (PBNU) pada tanggal 3 Juni 1998 membentuk Tim Lima yang ditugaskan untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim ini dipimpin oleh K.H. Ma’ruf Amin (Rais Syuriah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggotanya adalah K.H. M. Dawan Anwar, K.H. Said Aqil Siradj, H.M. Rozy Munir, dan Ahmad Bahdja. Akhirnya, disepakati pendirian partai politik baru dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Secara historis pula, partai ini mempunyai hubungan kultural dan hubungan aspiratif dengan segenap warga *Nahdliyin*.⁶ Bahkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung sepenuhnya kelahiran partai ini, dan bukan itu saja, PKB direkomendasikan secara resmi oleh PBNU.⁷ Puncaknya adalah deklarasi partai yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998, dengan asas partai adalah Pancasila dan prinsip *ahlusunnahwaljama’ah*.

Dalam perhelatan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999, dengan dimotori Poros Tengah, sebuah koalisi partai politik yang berbasis Islam, Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya Gus Dur banyak menuai kecaman, bahkan ia dianggap terlibat dalam sejumlah persoalan yang menyita perhatian publik. Persoalan tersebut adalah tuduhan terhadap Gus Dur yang dinilai “bermain mata” dengan tersangka Tommy Soeharto dalam perkara hukum yang memunculkan istilah *Borobudur gate*. Yang menghebohkan adalah pengakuan seorang perempuan bernama Aryanti yang mengaku telah berbuat tidak pantas dengan Gus Dur. Perkara ini juga melambungkan istilah *Aryanti gate* di jagad politik nasional. Terakhir, adalah dugaan bahwa Gus Dur menerima dana Bulog yang memaksa kalangan DPR membentuk Pansus

partai Nahdlatul Ulama itu. Ternyata keinginan itu tidak menjadi kenyataan karena PBNU dan banyak PWNU serta PCNU berpendapat sebaiknya NU tetap menjadi ormas saja, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan Khittah 1926. Akan tetapi, ada juga pihak yang beranggapan bahwa *khittah* itu adalah sesuatu yang tidak bersifat sakral dan bisa ditafsirkan secara kontekstual sesuai ruang dan waktu serta situasi tertentu.” Lihat Sholahuddin Wahid, “Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU”, dalam *Republika*, 3 Oktober 1998.

⁶ Julia I. Suryakusuma, *Almanak Parpol Indonesia*, (Jakarta: Yayasan API, 1999), hlm. 280.

⁷ Lihat Abdurrahman Wahid, “PKB didirikan oleh PBNU”, dalam Munib Huda Muhammad (Ed.), *Pro Kontra Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: Penerbit Fatma Press, 1998).

Bulog gate serta masalah bantuan dari Sultan Brunei Darussalam yang juga memicu lahirnya Pansus *Brunei gate*. Proses politik inilah yang di kemudian hari memaksa Gus Dur untuk turun tahta setelah melalui proses konstitusional dari Memorandum Pertama, Memorandum Kedua, hingga MPR memutuskan menggelar Sidang Istimewa yang berujung pada penggulingan pemerintahan Gus Dur.

Sidang Istimewa MPR itu tidak hanya berhasil menurunkan Gus Dur, tetapi menjadi pintu masuk bagi perpecahan dalam tubuh PKB. Dalam versi kelompok Gus Dur yang memecat Matori Abdul Djalil dari posisi ketua umum, dua kesalahan berat Matori adalah, *pertama*, melanggar keputusan DPP PKB tentang pembekuan fraksi dalam rangka mendukung bertahannya Gus Dur selaku presiden. *Kedua*, Matori membentuk DPP PKB tandingan. Dalam versi kubu Matori, pemecatan diri Matori sewenang-wenang karena tidak melalui muktamar. Karena silang pendapat inilah yang membuat kedua kubu ini (Gus Dur dan Matori) sulit dipertemukan, dan bahkan harus memasuki proses hukum.

Konflik internal di tubuh PKB bisa dibagi dalam tiga periode waktu. *Pertama*, kurun waktu antara 2001–2002, seperti disinggung di atas. *Kedua*, kurun waktu antara 2004–2007 dengan pihak yang terlibat adalah Ketua Dewan Syuro Abdurrahman Wahid–Ketua Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar (hasil Muktamar II PKB) dan Alwi Shihab–Saifullah Yusuf yang membuat muktamar tandingan di Surabaya. *Ketiga*, kurun waktu antara 2008–2011, yang melahirkan Muktamar Luar Biasa (MLB) kubu Abdurrahman Wahid (MLB Parung) dengan MLB Ancol kubu Muhaimin Iskandar.

Tulisan ini akan menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh PKB periode kedua dan bagaimana usaha elite PKB untuk menyelesaikannya. Konflik internal yang menimpa PKB dalam periode kedua ini lebih berat dibandingkan ketika PKB didera perseteruan antara kubu Abdurrahman Wahid dan kubu Matori Abdul Djalil pada tahun 2001–2002. Berat bobot konflik tahap kedua ini dapat dilihat dari, *pertama*, keterlibatan *kiai khos*⁸

⁸ Istilah *kiai khos* berarti *kiai khusus* (utama) yang juga bisa ditulis dengan *kiai khas* (menggunakan huruf “a”), namun yang

yang tergabung dalam Forum Langitan yang mendukung Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf. Dukungan para *kiai* yang sangat berpengaruh di kalangan *nahdliyin* ini ditunjukkan dengan penolakan mereka terhadap keputusan penonaktifan keduanya, menolak penyelenggaraan muktamar kedua PKB di Semarang berikut segala hasilnya, dan mendukung pelaksanaan muktamar di Surabaya, termasuk hasil-hasilnya. Abdurrahman Wahid juga berada dalam posisi konflik dengan kubu Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf karena ia menilai hasil Muktamar II PKB di Semarang sudah sah, *legitimate*, dan konstitusional.

Kedua, konflik tahap kedua ini melibatkan Jawa Timur dan Jawa Tengah, basis suara utama PKB yang menyumbang sekitar 80% dari total suara nasional yang diperoleh PKB pada Pemilu 1999 dan 2004. Di kedua provinsi inilah pesantren-pesantren besar dan berpengaruh yang dikelola para *kiai khos* itu berada, seperti Pesantren Langitan dan Pesantren Lirboyo. *Ketiga*, konflik PKB tahap kedua ini melahirkan partai politik baru yang bernama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Struktur dan komposisi pengurus PKNU ini mirip dengan hasil muktamar PKB kubu Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf di Surabaya. PKNU dideklarasikan sebagai partainya para *kiai* dalam arti merekalah yang menentukan perjalanan PKNU. Kelahiran PKNU ini berbeda dengan partai politik bentukan Matori Abdul Djalil, yakni PEKADE yang cepat menghilang lantaran ketiadaan dukungan dari para *kiai khos*.

Keempat, walaupun tidak terkait langsung dengan konflik internal PKB, sikap NU dalam menghadapi masalah ini menunjukkan PKB kini tidak bisa lagi mengklaim sebagai satu-satunya partai politik yang menampung dan memperjuangkan kepentingan kalangan *nahdliyin*. Sikap NU ini sesuai dengan hasil Muktamar NU ke-27 pada tahun 1984 di Situbondo yang menyatakan NU kembali ke Khittah 1926 dan

sering dipergunakan adalah *khos* (dengan menggunakan huruf “o”). *Kiai khos* adalah sebutan bagi *kiai* di kalangan NU yang memiliki syarat tertentu. Syarat tersebut adalah mempunyai wawasan dan kemampuan ilmu agama yang luas, memiliki laku atau daya spiritual yang tinggi, mampu mengeluarkan kalimat *hikmah* atau anjuran moral yang dipatuhi, dan jauh dari keinginan-keinginan duniawi. Lihat D.H.B. Wicaksono, “K.H. Abdullah Faqih: Sosok *Kiai Waskita* yang Disegani Gus Dur”, www.hidayatullah.com, diakses pada tanggal 9 Mei 2005.

kemudian dipertegas lagi dalam Mukhtar ke-31 tahun 2004 di Boyolali, Jawa Tengah di mana secara resmi NU mengambil sikap dan jarak yang sama dengan partai-partai politik yang ada. Artinya, PKB kini bukan lagi sebuah partai politik satu-satunya tempat aspirasi kalangan *nahdliyin* diperjuangkan. Dalam kasus konflik internal PKB, NU mengambil sikap netral dan juga berada dalam posisi tidak terlibat. Berbeda dengan konflik tahap pertama, NU cenderung mendukung sikap Abdurrahman Wahid.

Anatomi Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa

Konflik tahap kedua ini dipicu oleh penonaktifan Alwi Shihab–Saifullah Yusuf dari jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB periode 2002–2005. Alwi Shihab diberhentikan karena dinilai melanggar keputusan partai yang menjadi alasan kuat secara organisatoris. Alasan yang kuat secara organisatoris itu adalah perangkapan jabatan di mana dia menerima tawaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Sebelum Syaifullah Yusuf dinonaktifkan dari PKB dengan alasan formal yang mirip dengan Alwi Shihab itu, dia direposisi dari jabatannya selaku sekretaris jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB. Ada beberapa kasus sebelum reposisi itu diputuskan yang membuatnya berkonflik dengan Abdurrahman Wahid. Kasus tersebut antara lain hasrat Syaifullah Yusuf untuk maju sebagai ketua umum PKB pada saat Mukhtar Luar Biasa PKB di Yogyakarta. Saat itu Abdurrahman Wahid menyatakan ketidaksetujuannya karena dia baru saja keluar dari PDI Perjuangan sehingga tidak tepat untuk menduduki jabatan sekretaris jenderal, apalagi ketua umum DPP PKB. Syaifullah Yusuf menolak *ishlah* dalam kerangka hasil keputusan Mukhtar Luar Biasa PKB di Yogyakarta sehubungan dengan konflik dengan Matori Abdul Djilil. Syaifullah Yusuf menolak rencana pendirian Partai Kebangkitan Nasional (PKN) yang merupakan amanat Mukhtar Luar Biasa PKB di Yogyakarta jika PKB Kuningan tidak bisa ikut pemilu karena kalah di pengadilan melawan Matori Abdul Djilil (PKB Batutulis). Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PKB yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28–29

Mei 2003 memutuskan Abdurrahman Wahid sebagai satu-satunya calon presiden dari PKB. Namun, Syaifullah Yusuf justru mendukung calon lain, satu di antaranya adalah Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi.

Sekalipun Tim Tiga⁹ yang bertugas membuat klarifikasi atas diri Syaifullah Yusuf menyimpulkan kesalahannya ringan dan bukan kesalahan fatal yang merusak organisasi, namun Abdurrahman Wahid yang memimpin rapat Dewan Syuro tanggal 21 September 2004 tetap meminta untuk diambil keputusan. Hasil pengambilan keputusan dengan menggunakan mekanisme *voting* adalah dari 16 anggota Dewan Syuro 9 orang setuju Syaifullah Yusuf digeser, sedangkan 7 lainnya memilih peringatan keras. Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf menolak keputusan itu dengan alasan tidak sesuai dengan AD/ART dan peraturan partai, yang intinya mereka dipilih melalui forum mukhtar dan seharusnya menyampaikan pertanggungjawaban dan diberhentikan di forum mukhtar pula.

Keputusan menonaktifkan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf itu dapat dikatakan sebagai penyebab langsung dari kemunculan konflik internal PKB karena dua hal berikut. *Pertama*, dalam perselisihan mereka dengan kubu Abdurrahman Wahid–Muhaimin Iskandar, tema penonaktifan itu yang dijadikan isu utama perlawanan mereka. Baik ketika melibatkan para kiai *khos* maupun saat masuk ke dalam lembaga pengadilan, masalah penonaktifan itu yang selalu dijadikan isu utama. *Kedua*, sikap para kiai *khos* seperti ditunjukkan melalui hasil rapat dari pelbagai pertemuan mereka yang selalu menempatkan masalah penonaktifan sebagai pangkal persoalan dari konflik internal PKB. Saat yang bersamaan para kiai itu juga menjadikan pengembalian posisi Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf ke posisi semula, yakni ketua umum dan sekretaris jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB, sebagai syarat *ishlah* atau penyelesaian masalah.

Dari paparan di atas maka jelas telah terjadi konflik dalam bentuk perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antarkelompok yang setiap kelompok mempunyai, dalam istilah

⁹Tim Tiga itu terdiri atas K.H. Nur Iskandar Al-Barsany, Mahfud M.D., dan Moh. A.S. Hikam.

Ramlan Surbakti, “kepentingan yang berbeda-beda”¹⁰ atau menurut Austin Ranney, “mencoba meraih tujuan yang berbeda dan memuaskan kepentingan yang berlawanan.”¹¹ Kelompok dalam konteks konflik internal PKB tahap kedua ini adalah kubu Abdurrahman Wahid–Muhaimin Iskandar yang berseteru dengan kubu Alwi Shihab–Syaifullah Yusuf yang didukung oleh kiai *khos*. Sebaliknya, kepentingan yang berbeda adalah mengenai keabsahan penonaktifan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf, lalu tentang keabsahan pelaksanaan Muktamar II PKB di Semarang.

Kajian ini memperkuat pendapat Deliar Noer dan Bahtiar Effendy bahwa konflik yang melanda NU saat berkiprah di lapangan politik, baik dalam hubungannya dengan pihak luar maupun konflik yang terjadi di antara sesama fungsionaris, lebih disebabkan oleh faktor pragmatis yang terkait dengan perebutan posisi atau kursi kekuasaan. Ketika masih bernaung di PPP—yang di dalamnya terdapat unsur NU—terjadi konflik internal berkepanjangan di antara unsur-unsur partai, khususnya antara NU dan Parmusi. Pokok-pokok pertikaian itu, menurut analisis Bahtiar Effendy,¹² mulai dari isu-isu yang berkaitan dengan komposisi kepemimpinan partai hingga proses pencalonan wakil-wakil partai di parlemen. Sebelumnya, ketika NU di tahun 1952 keluar dari Masyumi lantaran, menurut analisis Deliar Noer,¹³ faktor kursi menteri agama yang tidak diberikan ke tangan NU.

Analisis di atas juga diperkuat oleh kesimpulan Kang Young Soon, yang menurutnya,¹⁴

¹⁰ Lihat Ramlan Surbakti, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1984). Dalam dinamika kehidupan sosial dan politik tidak terhindarkan bahwa manusia pasti menghadapi konflik serta kerja sama. Menurut Duverger, politik mempunyai dua aspek penting, yakni antagonis dan integrasi. Lihat Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. xxi dan 171.

¹¹ Austin Ranney mendefinisikan konflik sebagai “suatu bentuk pertarungan antaranggota masing-masing yang mencoba meraih tujuan yang berbeda dan memuaskan kepentingan yang berlawanan.” Lihat Austin Ranney, *Governing: An Introduction to Political Science*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1990), hlm. 27.

¹² Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998).

¹³ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965*, (Jakarta: Grafiti, 1987), hlm. 80–82.

¹⁴ Kang Young Soon, “Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan

dengan menggunakan pandangan Maurice Duverger, konflik internal NU bersumber pada tipe konflik pertama yang berkaitan dengan kepentingan politik, baik dalam NU maupun tingkat nasional, dan tipe konflik kedua yang berkaitan dengan perbedaan pandangan dalam penafsiran. Tipe konflik yang pertama berkenaan dengan masalah praktis yang tidak berhubungan dengan persoalan ideologi. Perbedaan pendapat yang lahir dari kepentingan politik seseorang atau sekelompok orang yang bertikai dapat dimasukkan dalam kategori ini. Adapun tipe konflik kedua menyangkut perbedaan pandangan mengenai suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan partai, atau kepentingan organisasi, atau masyarakat yang dianggap diwakili partai. Perbedaan sikap dan pandangan yang berkaitan dengan kebijakan partai atau organisasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum agaknya dapat dikelompokkan dalam kategori ini.

Dukungan kiai *khos* kepada Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf ditunjukkan dengan penolakan para kiai terhadap kebijakan penonaktifan keduanya karena dinilai melanggar AD/ART dan peraturan partai serta mendesak untuk mengembalikan posisi mereka sebagai syarat penyelesaian konflik internal PKB. Mereka mempersilakan keduanya untuk melakukan perlawanan dalam bentuk gugatan ke pengadilan. Mereka juga menolak pelaksanaan Muktamar II PKB di Semarang berikut seluruh produk dari muktamar tersebut dan memerintahkan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf untuk melaksanakan “muktamar yang benar”. Puncak perlawanan kiai *khos* adalah ketika mereka memutuskan mendirikan partai politik baru bernama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dalam pertemuan pada tanggal 21 November 2006 di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.

Dalam konteks ini sikap para kiai itu dipandang sebagai refleksi atas keinginan untuk *iqamatulhaqwal ‘adl* (menegakkan kebenaran dan keadilan). Hal lain adalah mereka memaknai penonaktifan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf itu sebagai puncak dari sikap pembangkangan kepada para kiai yang mendirikan PKB. Sikap

Nahtlatul Ulama, 1984–1999”, *Disertasi*, tidak diterbitkan, (Depok: Bidang Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana FISIP UI, 2002).

kontroversial Abdurrahman Wahid, sebagaimana tercantum dalam buku *9 Alasan Mengapa Kiai-kiai Tidak (lagi) Bersama Gus Dur*, juga memberikan kontribusi bagi lahirnya sikap untuk tidak lagi mendukung PKB di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid itu.

Melihat posisi dan sikap yang diambil oleh kiai *khos* itu maka dapatlah dikatakan bahwa keberpihakan mereka kepada Alwi Shihab dan Syaifulloh Yusuf membuat konflik internal PKB ini semakin berat. Adalah bobot dari posisi kiai *khos* dalam lanskap kultural NU itulah yang membuat konflik ini lebih berat dan juga berbeda jika dibandingkan konflik tahap pertama, yakni antara Abdurrahman Wahid dan Matori Abdul Djali. Dalam konflik pertama tersebut, praktis Matori Abdul Djali tidak memiliki sandaran kultural yang membuatnya tidak memiliki legitimasi kuat dalam melawan Abdurrahman Wahid. Bahkan Abdurrahman Wahid sendiri malah didukung oleh kiai *khos* yang tergabung dalam Forum Langitan itu. Dalam kasus konflik internal PKB, baik yang pertama maupun kedua, posisi para kiai kharismatik selalu ada di baris depan sebuah konflik dan sekaligus berposisi sebagai patron.

Pergeseran dukungan kiai *khos* dari semula mendukung Abdurrahman Wahid dalam konflik internal tahap pertama menjadi berlawanan dalam konflik tahap kedua, menunjukkan walaupun memiliki pola hubungan patron-klien namun relasi ini bisa berubah karena hal-hal yang bersifat pragmatis. James Scott menyebut bahwa faktor penting dalam patron-klien adalah hubungan kekuasaan.¹⁵ Bentuk konkret dari perubahan relasi ini adalah adanya perpecahan kelompok karena adanya patron kecil atau klien yang merasa layak menjadi patron atau elite. Dalam dunia politik, menurut Maswadi Rauf, perubahan komposisi itu bisa berupa perubahan aliansi politik dalam bentuk perpecahan antara pemimpin partai dan elite partai.

Kasus penonaktifan Alwi Shihab dan Syaifulloh Yusuf ini merupakan puncak kekecewaan kiai *khos* atas kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Kasus ini juga memperkuat pandangan

¹⁵ James S. Scott sebagaimana dikutip Maswadi Rauf dalam *Konsensus dan Konflik: Sebuah Penajagan Teoritis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 92.

Mahrus Irsyam bahwa para kiai dan struktur budaya pesantren yang melingkupinya mempunyai masalah ketika berhadapan dengan dunia politik. Pola hubungan *syuriyah* (ulama) dan *tanfidziyah* (pelaksana) dalam tubuh NU yang diangkat dari pola hubungan antara kiai dan santri yang tumbuh sebagai tradisi pesantren; justru setelah terlibat dengan masalah-masalah politik seperti tersebut di atas maka *syuriyah* dan *tanfidziyah* pun sama-sama memainkan peran sebagai politisi. Artinya, batas yang tegas dalam tradisi pesantren, yang membedakan dan sekaligus mengatur hubungan antara kiai dan santri di dunia pesantren menjadi kabur (atau malah hilang sama sekali) ketika dipergunakan di dalam tubuh NU untuk mengatur hubungan antara ulama dan politisi.¹⁶

Dalam kasus konflik internal PKB tahap kedua ini sikap Abdurrahman Wahid adalah mendukung Muhaimin Iskandar. Hal itu terlihat pada saat reposisi Saifullah Yusuf yang diputuskan dalam rapat yang dipimpinnya, yang kemudian menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai pengganti Saifullah Yusuf. Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai wakil ketua DPR ini juga direstui oleh Abdurrahman Wahid untuk maju dalam pemilihan ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB dalam Muktamar II PKB di Semarang. Restu dari Abdurrahman Wahid ini diperlukan karena berdasarkan ketentuan persyaratan calon ketua umum adalah calon memang dipersyaratkan tidak bermasalah dengan Dewan Syuro yang dalam hal ini adalah Abdurrahman Wahid. Muhaimin Iskandar akhirnya terpilih sebagai ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB, selain Abdurrahman Wahid yang juga terpilih sebagai ketua umum Dewan Syuro DPP PKB Periode 2005–2010. Kubu Abdurrahman Wahid menilai pelaksanaan dan seluruh hasil Muktamar II PKB di Semarang telah sah, *legitimate*, dan konstitusional. Sebuah penilaian yang ditentang oleh kubu Alwi Shihab–Saifullah Yusuf yang didukung oleh kiai *khos* yang tergabung dalam Forum Langitan.

Penonaktifan itu juga menunjukkan kuatnya faktor Abdurrahman Wahid dalam tubuh PKB karena ditopang oleh setidaknya dua hal. *Pertama*, legitimasi kultural yang dia peroleh dari komunitas *nahdliyin* sebagai akibat dari garis

¹⁶ Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Kritis*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), hlm. 8.

keturunan yang bermuara kepada pendiri NU. Dalam konteks budaya paternalistik yang kuat di kalangan *nahdliyin*, dengan garis keluarga yang dimiliki Abdurrahman Wahid ini praktis menempatkannya dalam posisi strategis. *Kedua*, legitimasi struktural yang ditunjukkan dengan posisi Abdurrahman Wahid selaku ketua Dewan Syuro DPP PKB. Lembaga ini sangat menentukan di mana setiap keputusan strategis partai harus dikonsultasikan dengan Dewan Syuro.

Kedua kondisi itu mempercepat Abdurrahman Wahid untuk masuk ke dalam apa yang disebut oleh Robert Michels sebagai “hukum besi oligarki” yang menggambarkan suatu ironi dari demokrasi, yakni bahwa organisasi demokratis semodern apa pun tidak dapat sepenuhnya menolak kecenderungan yang sesungguhnya merupakan bentuk lain dari sikap yang tidak demokratis. Ciri terpenting dari kecenderungan oligarkis yang melanda partai politik adalah diperlihatkannya sikap antikritik para pemimpinnya.¹⁷

Kiprah kontroversial Abdurrahman Wahid yang menuai konflik dengan pelbagai pihak selama ini memunculkan dugaan tentang sifat-sifat pribadi dan karakteristik kejiwaan dalam dirinya sebagai penyebab kemunculan konflik. Maurice Duverger, misalnya, menunjuk sifat-sifat pribadi dan karakteristik kejiwaan yang dimiliki individu sebagai penyebab konflik. Teori Duverger tentang penyebab konflik menunjukkan bahwa konflik kelompok dapat pula ditimbulkan oleh bakat-bakat individual selain tentu saja merupakan penyebab terjadinya konflik pribadi. Tidaklah mengherankan apabila individu yang mempunyai kecenderungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain selalu terlibat konflik dengan orang lain di mana pun ia berada. Masalah akan terjadi apabila bakat-bakat individual seperti itu menimbulkan konflik kelompok sehingga menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan konflik pribadi. Lebih berbahaya lagi jika kondisi tersebut terdapat pada pemimpin sebuah partai politik, yang akan selalu menyeret kelompoknya ke dalam konflik dengan kelompok-kelompok

lain.¹⁸ Kasus konflik internal PKB tahap kedua ini, sekali lagi, menunjukkan dugaan tentang sifat-sifat pribadi dan karakteristik kejiwaan dalam diri Abdurrahman Wahid sebagai penyebab kemunculan konflik.

Konflik internal PKB itu juga menunjukkan Abdurrahman Wahid mengalami “proses dekarismatisasi” yang ditandai dengan kiai *khos* yang menjadi salah satu rujukan utama warga NU dalam berpolitik memosisikan Abdurrahman Wahid sebagai lawan politik mereka. Padahal pada konflik internal PKB yang pertama, Abdurrahman Wahid memperoleh dukungan riil dari kiai *khos*. Sebelumnya dukungan yang sama untuk perebutan kursi presiden juga ia peroleh pada saat pelaksanaan Sidang Umum MPR tahun 1999 dan juga ketika MPR menjatuhkannya dalam Sidang Istimewa tahun 2001. Dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah tanggal 28 November–2 Desember 2004, Abdurrahman Wahid juga dikalahkan oleh K.H. Hasyim Muzadi secara mutlak.

Beberapa kasus di atas memperkuat studi Mohammad Ihyak yang dengan menggunakan perspektif sosiologi memberikan gambaran proses terjadinya dekarismatisasi Abdurrahman Wahid. Dia membaginya ke dalam lima fase. *Pertama*, terhitung sejak berubahnya strategi perjuangan dan pengabdian Abdurrahman Wahid dari yang bersifat kultural ke politik praktis. *Kedua*, internalisasi nilai-nilai politik menjadi tujuan kekuasaan. *Ketiga*, mengerasnya respons dan kritik masyarakat terhadap pemerintahan pimpinan Abdurrahman Wahid. *Keempat*, mengkrystalnya perlawanan berbagai komponen masyarakat terhadap kekuasaan Abdurrahman Wahid. *Kelima*, langgengnya Abdurrahman Wahid di dunia politik praktis.¹⁹

Dari konflik internal PKB, tahap kedua ini melahirkan PKNU yang disokong oleh para kiai *khos* yang tergabung dalam Forum Langitan, pindahnya Syaifullah Yusuf ke PPP, kubu Alwi Shihab yang sedang menanti hasil peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) se-

¹⁷ Lebih jauh lihat Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkhis dalam Birokrasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984).

¹⁸ Maurice Duverger, sebagaimana dikutip Maswadi Rauf, *op. cit.*, hlm. 174.

¹⁹ Mohammad Ihyak, “Dekarismatisasi Gus Dur: Studi tentang Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid dalam Politik Praktis”, (Tesis pada Program Pascasarjana Sosiologi FISIP UI, 2004).

bagai upaya hukum paling akhir, dan keberadaan PKB pimpinan Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa pembentukan PKNU dan pindahnya Syaifullah Yusuf ke PPP adalah klimaks konflik internal PKB setelah melalui proses panjang yang melelahkan.

Upaya Penyelesaian Konflik

Ada tiga upaya penyelesaian konflik yang dilakukan, yaitu secara organisasi, hukum, dan politik, namun pada akhirnya semuanya gagal untuk mempertahankan keutuhan PKB. Penyelesaian secara formal organisasi, yakni dengan menggunakan instrumen yang diatur dalam ketentuan internal partai seperti AD/ART dan peraturan partai. Dalam AD/ART PKB tidak ada pasal yang mengatur secara spesifik mengenai penyelesaian konflik internal. Hal itu tampak dari saling klaim sebagai pihak yang benar dari para pihak yang berkonflik dengan menggunakan landasan AD/ART dan peraturan partai. Hasilnya, seluruh aturan main tersebut tidak mampu menyelesaikan sengketa. Akhirnya cara terakhir dalam bingkai organisasi yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan penyelenggaraan muktamar. Persoalannya adalah terjadi polemik di antara dua kubu yang saling bertikai terkait dengan keabsahan dari pelaksanaan muktamar itu sendiri. Masalah lainnya adalah soal keabsahan forum yang memutuskan penonaktifan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf dari posisi ketua umum dan sekretaris jenderal DPP PKB periode 2002–2005.

Forum muktamar di Semarang yang diharapkan mampu menjadi ajang rekonsiliasi sekaligus mengakhiri konflik para pihak yang bertikai malah semakin memperberat bobot konflik itu sendiri. Setelah upaya organisasi dengan menggelar muktamar dilaksanakan dan tidak mampu membuahkan hasil, para pihak yang bertikai melanjutkan perseteruan mereka ke lembaga pengadilan. Penyelesaian secara yuridis, yakni dengan menyerahkan pada lembaga pengadilan ini diambil lantaran mekanisme internal organisasi tidak mampu menyelesaikan konflik internal PKB. Alih-alih berakhir praktis pasca-Muktamar Semarang, konflik internal PKB justru semakin berat. Tidak hanya isu pencopotan terhadap

Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf yang terus dipersoalkan, tetapi juga menyeret Abdurrahman Wahid dan kiai *khos* yang tergabung dalam Forum Langitan ke dalam pusaran konflik yang nyaris tiada henti.

Upaya lain dalam menyelesaikan konflik internal PKB adalah dengan menggunakan jalur politik. Kedua belah pihak mengambil langkah-langkah di luar instrumen organisasi dan di luar jalur hukum untuk mengukuhkan eksistensi masing-masing. Dalam konteks penyelesaian konflik internal PKB secara politik ini ada dua langkah yang ditempuh, yaitu kedua belah pihak berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Setelah upaya organisasi dan hukum gagal, salah satu kubu keluar dari PKB dan membentuk partai politik baru.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kegagalan seluruh upaya penyelesaian konflik di atas disebabkan oleh empat faktor berikut. *Pertama*, AD/ART PKB yang memberi kewenangan terlampau besar kepada Dewan Syuro yang dipimpin Abdurrahman Wahid. Kewenangan Dewan Syuro yang terlampau besar itu terlihat dalam ketentuan Anggaran Dasar (AD) PKB hasil Muktamar Luar Biasa Yogyakarta pada Bab IX Susunan Pengurus Partai Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dewan Syuro adalah Pimpinan Tertinggi Partai yang menjadi rujukan utama kebijakan-kebijakan umum Partai.” Kewenangan yang besar ini membuat Dewan Syuro dapat mengambil beberapa kebijakan strategis.

Kedua, sejak awal kemunculan konflik tiap-tiap pihak sudah bersikukuh dengan sikapnya dan sangat yakin bahwa kubunya-lah yang benar. Kubu Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf bertolak dari pandangan bahwa penonaktifan itu tidak sah lantaran mereka dipilih lewat forum muktamar. Karena dipilih dalam forum muktamar maka mereka berpandangan bahwa harus ada pertanggungjawaban dalam forum muktamar dan pemberhentian juga harus dilakukan melalui forum muktamar. Sebaliknya, kubu Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar juga menggunakan argumentasi formal prosedural untuk membenarkan langkah mereka termasuk dalam menyelenggarakan Muktamar II PKB di Semarang.

Ketiga, jalur hukum sebagai cara untuk mendapatkan kepastian perihal siapakah yang benar dalam kasus konflik internal PKB ini justru menghasilkan keputusan yang tidak jelas. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1896 K/P.dt./2005 tertanggal 15 November 2005 atas Perkara Kasasi Perdata antara Alwi Abdurrahman Shihab (Alwi Shihab) melawan K.H. Abdurrahman Wahid dkk., yang mestinya menjadi lembaga pemberi kepastian hukum terakhir malah dinilai mengambang dan juga memunculkan klaim saling menang di antara kedua kubu yang berseteru. Keputusan MA itu membuat posisi pemerintah menjadi sulit dan pada akhirnya tidak mampu mengambil sikap yang tegas pula. Ketidaktegasan tersebut terlihat dengan diterimanya kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Semarang (kubu Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar) dan Muktamar Surabaya (kubu Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf).

Keempat, memang ada upaya penyelesaian konflik internal PKB di luar jalur organisasi, hukum, dan politik, seperti seruan *ishlah* atau perdamaian dari pelbagai pihak. Penyelesaian cara NU, yakni dengan usaha mempertemukan patron dari masing-masing kubu, yakni K.H. Abdullah Faqih dan Abdurrahman Wahid juga sempat diupayakan. Namun, tiga kali upaya pertemuan tersebut dilakukan dan gagal. Bagi kubu Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf, cara kultural itu tidak akan menyelesaikan persoalan karena kasus konflik ini berada di wilayah politik yang penyelesaiannya harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Perdamaian yang dilakukan atas fasilitas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga pernah diupayakan, namun juga berujung pada kegagalan. Kiai *khos* yang tergabung dalam Forum Langitan memang pernah menawarkan *ishlah* dengan syarat kubu Muhaimin Iskandar mengakui apa yang mereka klaim sebagai kekalahan hukum menyusul putusan MA dan tunduk pada kemauan pihak Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf. Sebuah syarat yang tentu tidak bakal disetujui oleh Muhaimin Iskandar dan juga Abdurrahman Wahid yang belakangan mengampanyekan forum kiai kampung sebagai tandingan terhadap kiai *khos*.

Penutup

Dalam kasus konflik internal PKB ini konsensus itu tidak terbentuk, yakni kedua belah pihak tidak berhasil mencapai titik temu. Implikasi teoretis dari kajian konflik internal PKB tahap kedua ini adalah *pertama*, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifat pragmatis, yakni terkait dengan posisi atau jabatan di dalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanya berlaku ketika kalangan *nahdliyin* bergabung dengan komponen bangsa yang lainnya, seperti ditunjukkan oleh studi Deliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi)²⁰ dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP)²¹, namun studi ini menunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik terjadi di antara sesama fungsionaris partai. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa konflik merupakan salah satu tradisi NU nampaknya perlu ditambah dengan penjelasan konflik yang dipicu oleh masalah pragmatisme kekuasaan, yang merupakan salah satu tradisi NU.

Kedua, terjadi pergeseran nilai dalam hubungan kiai-santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron-klien ketika kalangan *nahdliyin* berkiprah di wilayah politik. Kasus konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadi unsur pembentuk budaya pesantren bisa dengan cepat berubah lantaran masalah pragmatisme kekuasaan. Perubahan itu terlihat dengan posisi dan sikap yang diambil kiai *khos* yang tergabung dalam Forum Langitan yang semula menjadi pendukung Abdurrahman Wahid kini berbalik menjadi saling berhadapan. Alwi Shihab yang dulu didukung Abdurrahman Wahid untuk menjadi ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB pada muktamar luar biasa PKB di Yogyakarta juga kini berbalik menjadi saling berhadapan.

Ketiga, Abdurrahman Wahid bukan lagi satu-satunya *determinant factor* di tubuh PKB, atau setidaknya kini dia mengalami proses dekarismatisasi. Bahwa benar konflik ini tercipta lantaran posisi kultural dan struktural Abdurrahman Wahid yang kuat, namun kasus konflik internal PKB ini juga menunjukkan aktor penting di tubuh PKB kini sudah menyebar, yakni selain

²⁰ Lebih lanjut lihat Deliar Noer, *op cit*.

²¹ Lebih lanjut lihat Bahtiar Effendy, *op cit*.

Abdurrahman Wahid sendiri juga ada kiai *khos* yang tergabung dalam Forum Langitan dengan tokoh utamanya K.H. Abdullah Faqih.

Ketidakmampuan elite PKB dalam menyelesaikan konflik internal tidak hanya pada periode 2004–2007 itu, namun juga hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. PKB tetap terbelah menjadi dua kubu, yakni antara kubu Muhaemin Iskandar dan kubu Yeni Wahid dengan partainya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PK-BIB), gagal menjadi peserta Pemilu 2014.

Daftar Pustaka

Buku

- Julia I. Suryakusuma. 1999. *Almanak Parpol Indonesia*. Jakarta: Yayasan API.
- Duverger, Maurice. 1985. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Ihyak, Mohammad. 2004. “Dekarismatisasi Gus Dur: Studi tentang Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid dalam Politik Praktis”. *Tesis Magister*. Depok: Program Pascasarjana Sosiologi FISIP UI.
- Irnyam, Mahrus. 1984. *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Kritis*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Kahin, George McTurnan. 1980. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkhis dalam Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad, Munib Huda (Ed.). 1998. *Pro Kontra Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: Penerbit Fatma Press.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965*. Jakarta: Grafiti.
- Ranney, Austin. 1990. *Governing: An Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus dan Konflik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Salim H.S., Hairus et al. 1999. *Tujuh Mesin Pendulang Suara*. Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS Gamiran.
- Salim, Arskal. 1999. *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*. Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta.
- Soon, Kang Young. 2002. “Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitan Nahdlatul Ulama, 1984–1999”. *Disertasi*. Depok: Bidang Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana FISIP UI.
- Surbakti, Ramlan, 1984. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Surabaya: Airlangga University Press.

Surat Kabar dan Website

- Wahid, Sholahuddin. 1998. “Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU”, *Republika*, 3 Oktober.
- Wicaksono, DHB. 2005. “KH Abdullah Faqih: Sosok Kiai Waskita yang Disegani Gus Dur”, [online] dalam www.hidayatullah.com [diakses 9 Mei 2005].